

Widhi Setyo Putro

PEMBEBASAN IRIAN BARAT: UPAYA PEWUJUDAN KEDAULATAN POLITIK DAN EKONOMI

"...Kami di Indonesia masih mempunyai suatu masalah kolonial, karena seperlima dari wilayah republik kamu masih diduduki dan dikuasai oleh kolonis-kolonis Belanda... Irian Barat merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Republik Indonesia dan kami menuntut agar kekuasaan republik ditegakkan di daerah tu dengan segera".

Kutipan pidato Presiden Sukarno di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara-Negara Non Blok I di Beograd tanggal 1 September 1961 tersebut mempertegas keinginan Pemerintah Indonesia untuk berdaulat secara penuh di Irian Barat. Masalah Irian Barat muncul sejak tahun 1949 ketika Konferensi Meja Bundar (KMB). Hasil konferensi tersebut tidak menyertakan Irian Barat dalam kesepakatan wilayah kedaulatan yang diserahkan oleh Belanda. Presiden Sukarno mengibaratkan masalah Irian Barat sebagai duri yang menusuk dalam dan harus segera dicabut. Namun, usaha untuk membebaskan Irian Barat dari Belanda tidaklah mudah. Pemerintah Indonesia harus menggunakan beberapa cara antara lain diplomasi politik, konfrontasi politik, ekonomi dan militer sebelum akhirnya Irian Barat berhasil direbut.



Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta sedang memberikan kata sambutan pada acara pembukaan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, 23 Agustus 1949
Sumber: Inventaris Arsip Foto IPPHOS 1945 – 1950 (No. 1357)

Diplomasi Politik

KMB yang berlangsung pada 23 Agustus - 2 November 1949 menyisakan satu persoalan terkait status Irian Barat. Persoalan tersebut muncul ketika delegasi Belanda menginginkan Irian Barat mendapatkan status khusus, karena dianggap tidak mempunyai hubungan dengan wilayah Indonesia lainnya. Sementara delegasi Indonesia berpendapat bahwa Irian Barat adalah bagian dari Indonesia Timur yang termasuk dalam wilayah

Republik Indonesia Serikat (RIS) dan selama ini telah terjalin hubungan etnologis, ekonomi, dan agama (Bone, 1952:57). Untuk menghindari kegagalan KMB, disepakati bahwa masalah Irian Barat akan diselesaikan dengan perundingan oleh Kerajaan Belanda dan RIS dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949.

Pasca penyerahan kedaulatan, dilakukan langkah awal untuk menyelesaikan masalah Irian Barat

yaitu melalui jalur diplomasi politik. Salahsatu bentuknya yaitu perundingan bilateral dengan Belanda dalam bentuk Konferensi Menteri-Menteri Uni Indonesia-Belanda. Konferensi ini berlangsung pada Maret 1950 di Jakarta dan 4 Desember 1950 di Den Haag. Hasilnya adalah kesepakatan untuk membentuk Komisi Gabungan yang bertugas untuk mengumpulkan fakta tentang Irian Barat. Akan tetapi, hasil komisi tersebut selalu mempunyai tafsiran berbeda tentang hak atas Irian Barat sehingga perundingan menemui jalan buntu. (Djamhari, 1995: 8)

Kegagalan perundingan dengan Belanda membuat Indonesia menggunakan upaya lain dalam bidang diplomasi politik. Diantaranya dengan mencari dukungan dalam forum internasional seperti Konferensi Asia-Afrika (KAA), Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok (KTT GNB). Melalui KAA, Indonesia berhasil memperoleh dukungan dengan memasukan masalah Irian Barat ke dalam komunike akhir KAA. Sementara perjuangan melalui PBB dilakukan pada Sidang Umum PBB ke IX tahun 1954 hingga Sidang Umum PBB ke XII tahun 1957. Akan tetapi setiap resolusi yang diusulkan oleh Indonesia selalu mengalami kegagalan.

Konfrontasi Politik dan Ekonomi

Setelah perjuangan diplomasi politik tidak berhasil, Pemerintah Indonesia kemudian memutuskan untuk menempuh jalan konfrontasi politik dan ekonomi. Bentuk dari konfrontasi politik yaitu pemutusan hubungan Uni Indonesia-Belanda pada 15 Februari 1956, pembatalan persetujuan KMB pada 2 Maret 1956



Rapat Trikora, Rapat Trikora dengan isi: Gagalcan pembentukan negara boneka di Papua buatan Belanda, Kibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat, Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan tanah air dan bangsa, Desember 1961. Sumber: Kempen Wilayah Jawa Tengah 1950-1965, Nomor 637

(lihat UU Nomor 13 Tahun 1956) dan membentuk Provinsi Otonomi Irian Barat pada 16 Agustus 1956 (lihat UU Nomor 15 Tahun 1956).

Sementara itu, bentuk dari konfrontasi ekonomi antara lain melakukan pemogokan dan menasionalisasi perusahaan milik Belanda seperti maskapai penerbangan, maskapai pelayaran, bank, pabrik gula, dan perusahaan gas (lihat UU Nomor 86 Tahun 1958). Konfrontasi politik dan ekonomi mencapai puncaknya pada 17 Agustus 1960 ketika Pemerintah Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Kerajaan Belanda (Cholil, 1971: 15-23).

Konfrontasi Militer

“Kami telah berusaha untuk menyelesaikan Irian Barat dengan penuh kesabaran dan penuh toleransi.. kami telah berusaha menggunakan alat-alat PBB...harapan lenyap,

kesabaran hilang dan toleransi pun mencapai batasnya. Semuanya itu kini telah habis dan Belanda tidak memberikan alternative lainnya, kecuali memperkeras sikap kami”. Hal ini sebagaimana tertuang dalam arsip Pidato Presiden Sukarno di Sidang Umum PBB ke-15 di New York pada 30 September 1960, yang dapat dilihat di ANRI pada Inventaris Arsip KOTI, No. 80)

Perjuangan melalui konfrontasi politik dan ekonomi ternyata tetap tidak mengubah sikap Belanda atas Irian Barat. Belanda bahkan semakin berani dengan mengirim kapal induk Karel Doorman ke Irian Barat, membentuk Komite Nasional Papua dan Negara Papua. Oleh karena itu, seperti kutipan pidato di atas, pemerintah Indonesia mulai bersikap keras yaitu menggunakan upaya konfrontasi militer. Upaya ini diawali dengan misi militer oleh Menteri Luar Negeri Subandrio ke Uni Soviet untuk menjalin kerja sama pembelian senjata pada Januari 1961.



Pidato pejabat pemerintah saat penyerahan pemerintah UNTEA kepada RI. Tampak bendera PBB dan merah putih berkibar di Kotabaru.
Sumber: Kempen Wilayah Irian Barat 1957-1964 (No. 63-5134)

Upaya konfrontasi militer semakin meningkat ketika dibentuk Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat (KOTI Pemirbar) pada 14 Desember 1961 dengan Presiden Sukarno sebagai panglima besarnya. KOTI Pemirbar selanjutnya merumuskan Tri Komando Rakyat (Trikorra) yang diumumkan pada 19 Desember 1961 oleh Presiden Sukarno. Isi lengkap Trikorra yaitu: 1) Gagalkan pembentukan Negara Boneka papua buatan Belanda kolonialis; 2) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia; dan 3) Bersiap untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa (Lihat ANRI, Daftar Arsip Pidato Presiden RI 1958-1967, Nomor 926).

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Trikorra dibentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada 2 Januari 1962 dengan Brigadir Jenderal Suharto sebagai Panglima Mandala. Selanjutnya Panglima Mandala menyelenggarakan operasi militer

dengan tujuan mengembalikan wilayah Irian Barat. Operasi militer tersebut rencananya dilakukan dalam 3 fase yaitu infiltrasi (penyusupan pasukan), eksploitasi (serangan terbuka), dan konsolidasi (menegakkan kekuasaan secara penuh di seluruh Irian Barat).

Penyelesaian Damai

Sebelum ketiga fase operasi militer diselesaikan, terjadi insiden di Laut Aru yang menewaskan Komodor Yos Sudarso beserta awak kapalnya pada 15 Januari 1962. Hal ini menyebabkan ketegangan Indonesia dan Belanda semakin memuncak. Menanggapi situasi tersebut, Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy menunjuk Jaksa Agung Robert F. Kennedy untuk mengadakan perundingan. Kemudian atas prakarsa seorang diplomat Amerika Serikat, Ellsworth Bunker diusulkan sebuah penyelesaian damai yang disebut Rencana Bunker. Tindak lanjut dari Rencana Bunker adalah pelaksanaan Persetujuan New York pada 15 Agustus 1962. Persetujuan

ini memerintahkan Belanda untuk menyerahkan pemerintahan di Irian Barat kepada *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA) pada 1 Oktober 1962, dan selanjutnya UNTEA harus menyerahkan kepada Indonesia pada 1 Mei 1963 dengan ketentuan Indonesia harus mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) sebelum akhir 1969 (Abdullah, 2012: 425-427).

Kedaulatan Bidang Politik dan Ekonomi

Dengan ditandatangani Per-setujuan New York, maka berakhirilah kekuasaan Belanda di Irian Barat dan sejak 1 Mei 1963 kekuasaan atas Irian Barat sepenuhnya diserahkan kepada Republik Indonesia. Keberhasilan merebut Irian Barat merupakan salah satu pengejawantahan konsep Trisakti dari Presiden Sukarno. Trisakti yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara sosial budaya. Dalam konteks kemandirian politik, Pemerintah Indonesia telah berhasil mempertahankan persatuan dengan berdaulat secara penuh di Irian Barat.

Sementara dalam konteks kemandirian ekonomi, langkah konfrontasi ekonomi dengan cara nasionalisasi membuat dominasi ekonomi bangsa Barat berkurang. Karena sebelumnya sektor-sektor ekonomi utama di Indonesia masih dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan asing khususnya Belanda. Dengan beralihnya perusahaan-perusahaan asing menjadi milik negara maka kedaulatan ekonomi dapat terwujud.